# **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

## 1.1.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.



### Gambar 1.1 Logo Bank Indonesia

Sumber: https://www.bi.go.id/, 2022

Bank Indonesia memiliki visi dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya yaitu menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju (Bank Indonesia, 2020). Serta memiliki misi yaitu :

- Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah

pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja

sarna internasional.

5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan

pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk

memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan

ekonomi nasional.

6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik

secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta pelindungan konsumen

melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia.

7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang

mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang

baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

1.1.2 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Layanan sektor keuangan dan pembayaran nontunai juga menguntungkan ekonomi dan

masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah bahwa layanan pembayaran nontunai lebih efisien

dan efektif di sektor retail yang inklusif, terutama segmen mikro. Ini juga akan mempercepat

berbagai program terkait keuangan inklusif dan nontunai serta mendorong kerja sama di

ekosistem pembayaran (Bank Indonesia, 2020). Dengan demikian, Bank Indonesia diminta

untuk mengembangkan metode yang tepat untuk melakukan transaksi retail secara non tunai

dengan cepat dan efisien, seperti dengan QR Code.

QR Code Standar
Pembayaran Nasional

Gambar 1.2 Logo QRIS

Sumber: <a href="https://www.bi.go.id/">https://www.bi.go.id/</a>, 2020

<del>------</del>

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR code

pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. Bank Indonesia dan

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) membuat QRIS dengan standar internasional

2

EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan khusus negara. Ini memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, instrumen, dan negara (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2019).

Dalam pidato peluncuran QRIS, Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa QRIS memiliki karakteristik UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada akhirnya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah kepanjangan dari UNGGUL:

### a) UNiversal

QRIS dirancang untuk menerima pembayaran melalui berbagai aplikasi pembayaran yang menggunakan *QR Code*, sehingga masyarakat tidak perlu menginstal banyak aplikasi pembayaran yang berbeda. Selain itu, penggunaan QRIS ini bersifat inklusif, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan memungkinkan transaksi pembayaran baik di dalam negeri maupun luar negeri.

## b) GampanG

Mayarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel dan *Merchant* tidak perlu memajang banyak *QR code*, karena cukup dengan satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran apapun.

## c) Untung

Masyarakat memiliki fleksibilitas untuk menggunakan akun pembayaran QR mana pun yang diinginkan saat melakukan pembayaran, sementara *Merchant* hanya perlu memiliki minimal satu akun untuk menerima semua jenis pembayaran melalui QR *code*.

#### d) Langsung

Transaksi menggunakan QRIS langsung diproses secara instan. Baik masyarakat maupun *merchant* akan segera menerima notifikasi mengenai transaksi tersebut.

## 1.2 Latar Belakang

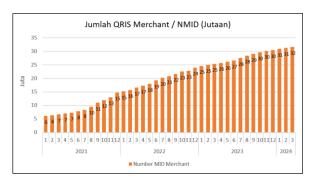
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan perubahaan yang cukup signifikan dalam kegiatan *financial*, yang menjadi lebih cepat, mudah, hemat waktu, dan tenaga. Khususnya, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai penemuan baru dalam bidang keuangan, terutama

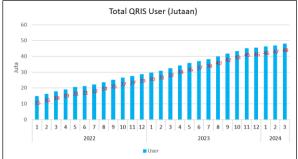
yang berkaitan dengan *financial technology* yang memungkinkan transaksi jual beli dan pembayaran menjadi lebih hemat dan efisien namun tetap efektif.

Financial technology atau dikenal dengan nama fintech adalah sebuah istilah yang mengaju pada teknologi baru dan inovatif yang digunakan untuk meningkatakan dan megotomatisasi layanan keuangan (Investopedia.com, 2023). Pemanfaatan financial technology (fintech) di Indonesia telah mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran, melahirkan fenomena yang dikenal sebagai cashless society. Cashless society adalah fenomena di mana masyarakat semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran digital daripada uang tunai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan hal tersebut Bank Indonesia memulai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014 yang bertujuan untuk mengurangi risiko ini dan mendorong masyarakat untuk menggunakan pembayaran non tunai (Developers BRI, 2019).

Peningkatan digitalisasi menyebabkan peningkatan transaksi non tunai di Bank Indonesia pada tahun 2023. Nilai transaksi uang elektronik meningkat 21,43% dari tahun 2022 menjadi Rp. 308,7 triliun. Selain itu, volume transaksi juga meningkat 14,44% dari tahun 2022 menjadi Rp. 26,9 miliar. Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital dikaitkan dengan penggunaan platform *e-commerce* dan instrumen digital selama masa pandemi, serta kecenderungan dan keinginan masyarakat terhadap transaksi digital (Bank Indonesia, 2023)

Pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia memperkenalkan QRIS sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pembayaran digital. Mulai tanggal 1 Januari 2020, semua pembayaran digital di Indonesia yang menggunakan QR *Code* harus menggunakan QRIS. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 yang mengatur penggunaan QRIS sebagai Standar Nasional kode QR untuk pembayaran. Penggunaan pembayaran non tunai, termasuk pembayaran digital berbasis QR *Code*, telah mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar negeri (Bank Indonesia, 2020). Dengan meluncurkan QRIS, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bertujuan untuk mempercepat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi perekonomian, dan mendukung perkembangan UMKM (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2019). QRIS dapat digunakan melalui aplikasi *mobile banking* atau e-wallet. Keuntungan utama QRIS adalah bahwa sekarang merchant hanya perlu memiliki satu QR *code*, yaitu QRIS, untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital. Selain itu, QRIS juga dapat diterapkan di berbagai jenis usaha seperti toko, warung, tiket wisata, dan kegiatan donasi yang bekerja sama dengan QRIS.

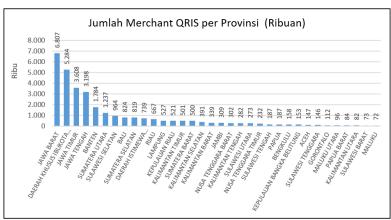




Gambar 1.3 Jumlah User dan Merchant QRIS

Sumber: https://www.aspi-indonesia.or.id/statistik-gris/, 2024

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), saat ini terdapat 32 juta *merchant* di Indonesia yang melayani pembayaran dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Jumlah ini meningkat 3,2% dari 31 juta *merchant* pada bulan sebelumnya (MtM). Jumlah *merchant* yang melayani pembayaran dengan QRIS meningkat 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY), pada maret 2023 jumlahnya tercatat sebanyak 25 juga *merchant*. Selain itu, jumlah pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebanyak 48 juta orang pada maret 2024. Jumlah ini meningkat 2,1% dibanding bulan sebelumnya (MtM) yang sebanyak 47 juta pengguna. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (YoY), jumlah pengguna QRIS di Indonesia tumbuh 50% pada maret 2023, jumlah pengguna QRID dilaporkan sebanyak 32 juta orang.



Gambar 1.4 Jumlah Merchant QRIS per Provinsi

Sumber: https://www.aspi-indonesia.or.id/statistik-gris/, 2024

Pada gambar 1.4, dapat dilihat bahwa Jawa Barat memimpin dalam jumlah merchant QRIS (Quick Response Indonesian Standard) di Indonesia, mencapai 6,81 juta merchant. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan 5,28 juta merchant, diikuti oleh Jawa Timur di posisi ketiga dengan 3,60 juta merchant. Meskipun berada di urutan ketiga, jumlah merchant QRIS

di Jawa Timur ini menunjukkan komitmen yang kuat dari provinsi tersebut dalam mendorong digitalisasi pembayaran di wilayahnya. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah dan pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan teknologi pembayaran nontunai guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi bagi masyarakat.

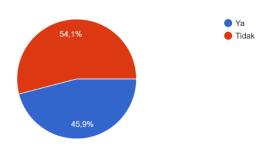
Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

No.	Daerah (Jawa Timur)	Pertumbuhan Ekonomi
1.	Kota Batu	6,19 %
2.	Sidoarjo	6,16 %
3.	Kota Malang	6,07 %
4.	Kota Probolinggo	6,04 %
5.	Kota Madiun	5,80 %

Sumber: <a href="https://rri.co.id">https://rri.co.id</a>, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Kota Madiun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mencapai 5,80%, meningkat dari 5,20% pada tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh beberapa sektor ekonomi utama di Kota Madiun (Badan Pusat Statistik, 2023). Di samping pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, Kota Madiun juga menunjukkan perkembangan menarik terkait adopsi teknologi pembayaran digital melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) di pasar tradisional. Bank Indonesia telah menetapkan Pasar Sleko di Kota Madiun sebagai pasar yang siap untuk menggunakan QRIS, sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan pembayaran digital di pasar-pasar tradisional di Jawa Timur. Dengan Pasar Sleko yang siap QRIS, diharapkan dapat memudahkan transaksi bagi pedagang dan pembeli serta mendorong pergerakan ekonomi di pasar tradisional tersebut, sejalan dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan dan transaksi non-tunai di pasar tradisional (jatim.antaranews.com, 2024).

Apakah Anda berminat untuk menggunakan QRIS di kehidupan sehari-hari? 37 jawaban



Gambar 1.6 Hasil Pra-Survey Minat Penggunaan

Meskipun QRIS telah diluncurkan dan diimplementasikan di Kota Madiun, fakta menunjukkan bahwa masyarakat Kota Madiun masih lebih dominan menggunakan pembayaran tunai dalam transaksi sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil pra-survey yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan *google form* kepada masyarakat Kota Madiun secara *random*. Dimana dalam hasil tersebut menyatakan bahwa 54,1% masyarakat Kota Madiun tidak berminat menggunakan QRIS di kehidupan sehari-hari, sedangkan 45,9% masyarakat Kota Madiun berminat menggunakan QRIS di kehidupan sehari.



Gambar 1.7 Hasil Pra-Survey Alasan Minat Penggunaan

Sumber: Hasil Pra-Survey, 2024

Pada gambar 1.7 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat adopsi QRIS, antara lain persepsi masyarakat bahwa QRIS terlalu rumit dan lebih memilih metode pembayaran tunai. Selain itu, rendahnya penggunaan QRIS di lingkungan sekitar juga menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, minat masyarakat untuk menggunakan QRIS dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan merchant yang menerima pembayaran QRIS, kemudahan penggunaan, serta berbagai manfaat yang dirasakan. Dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini minat masyarakat dalam menggunakan QRIS dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kebiasaan.

Ada berbagai model riset yang yang telah dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan teknologi tertentu. *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* 2 atau disebut dengan model UTAUT2 sebagai pemahaman dan memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi baru yang dikembangkan oleh Venkatesh, Thong, dan Xu pada tahun 2012 (Wardani & Masdiantini, 2022). UTAUT 2 dikembangkan dengan menggabungkan dan memperluas beberapa model teori penerimaan teknologi sebelumnya, termasuk UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) asli, TAM (*Technology Acceptance Model*) dan TPB (*Theory of Planned Behavior*). Model ini

mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat seseorang untuk menggunakan layanan pembayaran digital. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Masdiantini, 2022; Febriani et al., 2023; Izah, 2023; Ramadhan, 2023; Achiriani & Hasbi, 2021; Sa'ya, 2023) membuktikan bahwa faktor ekspektasi usaha (effort expectancy) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Sedangkan dalam penelitian (Astuti, 2023; Fitria Farsa, 2023; Hamzah Muchtar et al., 2024; Mayanti, 2020; Pah & Kornelius, 2023) disebutkan bahwa faktor ekspektasi usaha (effort expectancy) tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Lalu pada penelitian (Achiriani & Hasbi, 2021; Astuti, 2023; Hamzah Muchtar et al., 2024; Kartika, 2023; Pah & Kornelius, 2023) disebutkan bahwa faktor pengaruh sosial (social influence) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Akan tetapi, dalam penelitian (Fitria Farsa, 2023; Mayanti, 2020; Febriani et al., 2023; Sa'ya, 2023; Wardani & Masdiantini, 2022) diketahui bahwa faktor pengaruh sosial (social influence) tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Selanjutnya, (Amalia Ramadhan, 2023; Astuti, 2023; Chania & Rimenda, 2022; Fitria Farsa, 2023; Izah, 2023) menyebutkan bahwa faktor kebiasaan (habit) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Namun, (Mayanti, 2020; Febriana et al., 2023; Sa'ya, 2023) menyebutkan bahwa faktor kebiasaan (habit) tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS.

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti memilih untuk menggunakan variabel ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social influence), dan kebiasaan (habit) dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa dari ketiga variabel tersebut diduga memiliki pengaruh lebih besar terhadap minat penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Ekspektasi Usaha, Pengaruh Sosial, dan Kebiasaan Terhadap Minat Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Kota Madiun".

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana ekspektasi usaha berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun?
- 2. Bagaimana pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun?

- 3. Bagaimana kebiasaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun?
- 4. Bagaimana ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kebiasaan berpengaruh secara simultan terahadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun?

# 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit, maka tujuan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui ekspektasi usaha berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun.
- 3. Untuk mengetahui kebiasaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun.
- 4. Untuk mengetahui ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kebiasaan berpengaruh secara simultan terahadap minat penggunaan QRIS di Kota Madiun.

# 1.5 Kegunaan Penelitian

## 1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Kampus Universitas Telkom, diharapkan penilitian ini akan membantu pengembangan ilmu dan memperkaya bahan kepustakaan.
- b. Bagi Peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang pembayaran digital, terutama sistem pembayaran digital yang berbasis QRIS.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan atau acuan tambahan untuk informasi serupa saat melakukan penelitian terkait dan untuk pengembangan lebih lanjut.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Indonesia, diharapkan penelitian ini akan membantu dalam pengembangan sistem pengelolaan QRIS dengan memberikan masukan dan solusi.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital.

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

# BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian dianalisis dengan metodologi penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijadikan pembahasan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai rekomendasi dalam bentuk saransaran yang relevan dari penulis terhadap perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **LAMPIRAN**